

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SEMARANG

M. Daeni¹
Husnul Rizqi²

¹ Fisip Untag Semarang Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Duwur Semarang, Jawa Tengah, Indonesia,
email : Mdaenie@gmail.com

²Alumni Fisip Untag Semarang
Email :

Abstract

Garbage is a complex problem. High population growth has a big impact on waste production. Waste production is not comparable to waste management, and land area is limited. The city of Semarang manages waste with a sanitary landfill system that is able to produce methane gas from the rest of the waste to produce electricity and biogas. Even though they have used sanitary landfill, it is still inadequate. The number and quality of human resources, waste management infrastructure facilities are still inadequate. The Semarang City Government has made an arrangement by issuing Regional Regulation 6 of 2012 concerning Waste Management. This study aims to determine the implementation of the policy, especially article 17 of Law No. 6 of 2012. The study was conducted with a descriptive qualitative method. Data collection is done by observation, and in-depth interviews and secondary data. The results of this study show that the Semarang City Government has carried out the mandate as per post 17, but it has not been optimal, because waste production continues to increase, has not been fully supported by better infrastructure, low quality human resources and low community participation

Keywords: waste, management, transportation, sorting, City, Semarang, participation.

Abstrak

Sampah merupakan persoalan yang kompleks. Pertumbuhan penduduk yang tinggi berdampak besar bagi produksi sampah. Produksi sampah tidak sebanding dengan pengelolaan sampah, dan luas lahan yang terbatas. Kota Semarang mengelola sampah dengan sistem sanitary landfill yang mampu menghasilkan gas metana dari sisa sampah menghasilkan listrik dan biogas. Meskipun sudah menggunakan sanitary landfill namun masih belum mencukupi. Jumlah dan kualitas SDM, sarana prasarana pengelolaan sampah masih belum mencukupi. Pemerintah Kota Semarang telah pula melakukan pengaturan dengan menerbitkan Perda 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan khususnya pasal 17 Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yang pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi, dan wawancara mendalam didukung data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang sudah melaksanakan amanat sebagaimana pasal 17, namun belum optimal, karena produksi sampah yang terus bertambah, belum sepenuhnya didukung oleh sarana prasarana yang makin baik, kualitas SDM yang belum memenuhi dan partisipasi masyarakat yang rendah.

Kata Kunci : sampah, kelola, pengangkutan, pemilahan, Kota, Semarang, partisipasi.

1. PENDAHULUAN

Sampah merupakan sisa-sisa dari segala bentuk kegiatan manusia yang tidak

memiliki nilai untuk di pergunakan lagi. Sampah terus ada selama berlangsungnya kehidupan manusia itu sendiri, sehingga

sampah dijadikan permasalahan yang penting di suatu Negara. Tahun 2016 ada sekitar 65 juta ton sampah per harinya yang diproduksi masyarakat Indonesia. Jumlah ini naik satu ton dibandingkan produksi 2015 sekitar 64 juta ton sampah perhari.¹ Diprediksikan, pada 2019, produksi sampah di Indonesia akan menyentuh 67,1 juta ton sampah per tahun.²

Sampah berasal dari kegiatan penghasil sampah seperti pasar, rumah tangga, perkotaan (kegiatan komersial/perdagangan), penyapuan jalan, taman, atau tempat umum lainnya, dan kegiatan lain seperti dari industri dengan limbah yang sejenis sampah.³ Sumber dari sampah di masyarakat pada umumnya, berkaitan erat dengan penggunaan lahan dan penempatan.⁴ Beberapa sumber sampah dapat diklasifikasikan menjadi antara lain: 1) perumahan, 2) komersil, 3) institusi, 4) konstruksi dan pembongkaran, 5) pelayanan perkotaan, 6) unit pengolahan, 7) industri, dan 8) pertanian. Sumber sampah ini disebabkan oleh tiga hal yaitu tingkat konsumsi yang semakin meningkat, kesadaran masyarakat yang rendah dalam pengelolaan sampah, serta keterbatasan teknologi dan lahan dalam pemanfaatan sampah.

Persoalan pengelolaan sampah sudah menjadi persoalan umum di Indonesia termasuk Kota Semarang. Dinas kebersihan dan pertamanan Kota Semarang Pada tahun 2015 dengan jumlah penduduk Kota Semarang yang mencapai 1,6 juta jiwa di Kota Semarang, yang tersebar di 16 kecamatan dan 177 kelurahan, dimana volume sampah yang mendapatkan rata-rata pelayanan sampah per hari sekitar 87 %, dan adapun penghasil sampah terbanyak ialah daerah kecamatan pedurungan dengan jumlah volume sampah mencapai 564,28 M³/hari, sedangkan penghasil sampah terendah adalah kecamatan Tugu dengan jumlah volume sampah 96,67 M³/hari. Dan

total produksi sampah yang dihasilkan di Kota Semarang 4998,85 M³/hari.⁵

Dalam setiap harinya masyarakat Kota Semarang menghasilkan 1000 ton sampah. Sementara kapasitas yang mampu untuk di tampung ke TPA hanya mencapai 850 ton, sedangkan 15% sisanya dikelola oleh kurang lebih 50 bank sampah yang ada di Semarang menjadi pupuk dan gas metana.⁶ Pada tahun 2015 Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang Ulfi Imran Basuki mengatakan "Setiap harinya dari total 1.200 ton sampah yang dihasilkan dari seluruh Kota Semarang, 800 tonnya masuk ke TPA Jatibarang, sedangkan sisanya dikelola kelompok swadaya masyarakat, di bank-bank sampah."⁷ Di tahun 2016 produksi sampah di Kota Semarang mencapai 1.200 ton/hari dan terus meningkat setiap tahun, sementara kapasitas terangkut hanya 1.150 ton per hari.⁸ Ini berarti terdapat 50 ton sampah perhari yang tidak terangkut dan menjadi penyebab permasalahan lain di masyarakat seperti banjir, kerusakan lingkungan, kekumuhan dan persoalan sosial lainnya. Produksi sampah yang dihasilkan masyarakat ini menempatkan Kota Semarang sebagai penghasil sampah terbesar di Jawa Tengah.⁹ Sedangkan pada awal tahun 2017 Kota Semarang dengan jumlah penduduk mencapai 1,6 juta jiwa yang tersebar di 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan setiap harinya menghasilkan 1000 ton sampah, sementara yang masuk ke TPA mencapai 850 ton, 15% sisanya dikelola oleh kurang lebih 50 bank sampah yang ada di Kota Semarang.¹⁰

Peningkatan produksi sampah rumah tangga dipengaruhi oleh pola konsumsi dan tingkat ekonomi dari setiap individu. Apabila pendapatan seseorang meningkat maka akan berbanding lurus dengan konsumsi terhadap suatu barang dan jasa (Keyness, 1964). Keyness menjelaskan bahwa jika pendapatan meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat. Semakin tingginya tingkat konsumsi masyarakat maka semakin

¹ Siaran Pers

Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/03/15/omv2sg319-setiap-hari-indonesia-produksi-sampah-65-juta-ton>

² <https://geotimes.co.id/2019-produksi-sampah-di-indonesia-671-juta-ton-sampah-per-tahun>

³ E. Damanhuri dan Tri Padmi, *Probleme de Dechets Urban en Indonesie, TFE ENTPE (Perancis), 1982 E. Damanhuri (Editor): Teknik Pengelolaan Persampahan – Modul A dan Modul B, Disiapkan untuk PT. Freeport Indoensia, (Bandung: Teknik Lingkungan ITB, 1999).*

⁴ G. Theisen Tchobanoglous, dan S.A. Vigil, *Integrated Solid Waste Mangement Engineering Principles and Mangement Issues.* (Singapore, Mc. Grw Hill, 1993)

⁵ https://semarangkota.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Kota%20Semarang%20dlm%20Angka%202016-wm.pdf di unduh pukul 15.19 WIB tanggal 6 juli 2017 hal :75

⁶ <http://metrosemarang.com/benahi-pengelolaan-sampah-pemkot-anggarkan-90-kontainer-baru>

⁷ <http://beritajateng.net/edan-sampah-yang-dihasilkan-kota-semarang-capai-1-200-ton-perhari/>

⁸ <http://berita.suaramerdeka.com/sampah-masalah-serius-kota-semarang/>

⁹ Data dan Informasi Lingkungan Hidup Jawa Tengah tahun 2014, BLH Jawa Tengah

¹⁰ <http://semarangkota.go.id/berita/read/7/berita-kota/1574/semarang-hasilkan-1000-ton-sampah-perhari-sekda-minta-warga-peduli>

meningkat pula volume sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh masyarakat

Penanganan masalah sampah yang terangkum dalam UU No 18 Tahun 2008 adalah merubah paradigma lama dengan paradigm baru yaitu merubah cara pandang terhadap sampah yaitu memandang sampah bukan lagi sebagai sesuatu yang tidak berguna, tetapi melihat sampah sebagai sesuatu yang berharga dan menjadi sumber ekonomi dalam masyarakat dan negara.¹¹

Pemerintah Kota Semarang telah memiliki Peraturan Daerah dalam pengelolaan sampah yaitu perda nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Perda ini mengatur bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan sampah serta bagaimana masyarakat turut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Sayangnya upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah ini belum signifikan dengan produksi sampah yang terus meningkat dari hari ke hari. Perda ini hanya mengatur bagaimana sampah dikelola, namun belum sampai memperkuat posisi masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaan sampah. Pada pasal 17 di dalam Peraturan daerah Kota Semarang nomor 6 tahun 2012 dimana mengatur tanggung jawab pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan pengelolaan sampah Pemerintah Daerah, wajib melakukan: (1) pemeliharaan TPS, TPST dan TPA beserta pengembangannya sesuai dengan kebutuhan; (2) penyediaan sarana dan melakukan pengangkutan sampah dari TPS, TPST ke TPA; (3) penyediaan sarana dan melakukan pengolahan sampah di TPS, TPST dan TPA; dan (4) penyediaan sarana pemilahan sampah di TPS, TPST dan TPA.

Didalam Pasal 17 perda Kota Semarang nomor 6 tahun 2012 ini menyiratkan mengenai tanggungjawab pemerintah Kota Semarang dalam pengelolaan sampah. Empat yang jadi focus selama ini ada yang berhasil, namun beberapa diantaranya kurang sesuai dengan target yang ditetapkan. Upaya melaksanakan ketentuan dalam Perda telah dilakukan, namun belum optimal, terbukti pada kapasitas yang harusnya dapat dipenuhi dalam pengelolaan sampah hingga tahun 2017 belum sesuai dengan target. Beberapa penyebab yang dapat diidentifikasi adalah karena volume sampah yang makin meningkat seiring dengan tingkat konsumsi barang-

barang yang makin banyak, kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang masih rendah, penerapan sanksi yang kurang tegas, dan tingkat ketundukan terhadap perda yang masih lemah.

Persoalan menjadi makin pelik manakala jumlah produksi sampah yang terus meningkat, sementara luasan pengelolaan sampah makin menyempit, dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah. Hingga tahun 2019 produksi sampah mencapai angka 1.200 ton setiap hari, sementara luasan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang tidak berkembang yaitu 46 hektar. Guna mengurangi produksi sampah, Pemerintah Kota Semarang mengajak masyarakat untuk membentuk dan mengaktifkan bank sampah di setiap kelurahan. Saat ini, terdapat 83 bank sampah yang tersebar di 177 kelurahan.¹²

Sebuah kebijakan yang dirumuskan harus dipikirkan bagaimana dampak yang ditimbulkan akan hal tersebut. Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17)¹³ juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi sssmereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Menilik dari permasalahan sebagaimana tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan eksplorasi terhadap Implementasi Pengelolaan Sampah di Kota Semarang dengan tujuan mengetahui implementasi Pengelolaan Sampah di Kota Semarang.

2. METODE

2.1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dimana digunakan dengan cara menggunakan kalimat untuk mendiskripsikan suatu

¹¹Albert E. S. Abrauw, Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Anorganik Di Kecamatan Abepura Kota Jayapura, ISSN 0125-1790 MGI Vol. 25, No. 1, Maret 2011 (1 -14) © 2009 Fakultas Geografi UGM dan Ikatan Geograf Indonesia

¹²<https://jateng.tribunnews.com/2019/04/05/produksi-sampah-kota-semarang-1200-ton-per-hari-46-hektar-tpa-jatibarang-bakal-penuh>

¹³Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik :Teori dan Proses. Yogyakarta :Med. Press (Anggota IKAPI)

permasalahan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan mengkaji kasus-kasus tertentu secara menyeluruh. Selain itu, penelitian bertujuan menjelaskan secara terperinci masalah sosial tertentu dan akan dihasilkan data yang relevan, yaitu berupa data yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Tipe penelitian merupakan jenis-jenis yang digunakan dalam penelitian yang dijadikan sebagai dasar pengungkapan dan mengkaji maupun menguji penelitian agar menemukan hasil yang diinginkan.

2.2. Lokus dan Fokus Penelitian

Lokasi penelitian di Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Jatibarang Kecamatan Kedungpane Kota Semarang. Lokus penelitian ini tentang pengelolaan sampah di Kota Semarang. Fokus peneliti dalam melakukan penelitian ini ialah penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di TPS, TPST, dan TPA, dimana peneliti ingin menggambarkan prosedur penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan pasal 17 peraturan daerah Kota Semarang nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di Kota Semarang.

2.3. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh. Terdapat dua sumber yang bisa digunakan, yaitu sumber data primer maupun sumber data sekunder. Secara teoritis sumber data primer merupakan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kepada informan. Berupa jawaban dari questioner maupun hasil wawancara baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur dengan informan.

Sumber data sekunder merupakan pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui media – media, dokumen, buku-buku, laporan-laporan, daftar monografi dan sumber-sumber lain yang berkaitan dalam penelitian.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, sangat banyak cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang akan dijadikan kesimpulan suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini : (1) Observasi adalah teknik pengumpulan data yang

dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian agar diperoleh data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; (2) Wawancara mendalam. Pengambilan data melalui wawancara /secara lisan langsung dengan sumber datanya, baik melalui tatap muka atau lewat telephone, teleconference. Jawaban responden direkam dan dirangkum sendiri oleh peneliti; dan (3) Dokumen. Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga/institusi. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti dan diinterpretasikan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam sugioyono (2008 : 246) tahap analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum adalah (1) analisis selama pengumpulan dapat dimulai setelah peneliti memahami fenomena sosial yang sedang diteliti dan setelah mengumpulkan data; (2) reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan; (3) penyajian data. Dalam penyajian data yang merupakan alur penting dalam menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dan (4) Menarik kesimpulan/ verifikasi. Kegiatan analisis berikutnya merupakan menarik kesimpulan dan verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengelolaan Sampah

Menurut World Health Organization (WHO) definisi sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2006). Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.

Juli Soemirat (1994) berpendapat bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Azwar (1990) mengatakan yang dimaksud dengan sampah adalah sebagian

dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia (termasuk kegiatan industri) tetapi bukan biologis karena kotoran manusia (human waste) tidak termasuk kedalamnya. Manik (2003) mendefinisikan sampah sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia.

Menurut Reksosoebroto (1985) dalam Efrianof (2001) pengelolaan sampah sangat penting untuk mencapai kualitas lingkungan yang bersih dan sehat, dengan demikian sampah harus dikelola dengan sebaik-baiknya sedemikian rupa sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi. Dalam ilmu kesehatan lingkungan, suatu pengelolaan sampah dianggap baik jika sampah tersebut tidak menjadi tempat berkembangbiaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi media perantara menyebar luasnya suatu penyakit.

Syarat lainnya yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sampah ialah tidak mencemari udara, air, dan tanah, tidak menimbulkan bau (segi estetis), tidak menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya.

Keberadaan sampah tidak berdiri sendiri. Adanya sampah karena banyak factor dan situasi yang meliputinya. Oleh karena itu, sampah mempunyai sumber dan jenisnya masing-masing. Sumber-sumber sampah di Kota Semarang dapat diidentifikasi yaitu : Pertama, sampah yang berasal dari pemukiman (*domestic wastes*). Sampah ini terdiri dari bahan-bahan padat sebagai hasil kegiatan rumah tangga yang sudah dipakai dan dibuang, seperti sisa-sisa makanan baik yang sudah dimasak atau belum, bekas pembungkus baik kertas, plastik, daun, dan sebagainya, pakaian-pakaian bekas, bahan-bahan bacaan, perabot rumah tangga, daun-daunan dari kebun atau taman.

Kedua, sampah yang berasal dari tempat-tempat umum. Sampah ini berasal dari tempat-tempat umum, seperti pasar, tempat-tempat hiburan, terminal bus, stasiun kereta api, dan sebagainya. Sampah ini berupa kertas, plastik, botol, daun, dan sebagainya.

Ketiga sampah yang berasal dari perkantoran. Sampah ini dari perkantoran baik perkantoran pendidikan, perdagangan, departemen, perusahaan, dan sebagainya. Sampah ini berupa kertas-kertas, plastik, karbon, klip dan sebagainya. Umumnya

sampah ini bersifat anorganik, dan mudah terbakar (rubbish).

Keempat sampah yang berasal dari jalan raya Sampah ini berasal dari pembersihan jalan, yang umumnya terdiri dari: kertaskertas, kardus-kardus, debu, batu-batuan, pasir, sobekan ban, onderdil- onderdil kendaraan yang jatuh, daun-daunan, plastik, dan sebagainya.

Kelima sampah yang berasal dari industri (*industrial wastes*). Sampah ini berasal dari kawasan industri, termasuk sampah yang berasal dari pembangunan industri, dan segala sampah yang berasal dari proses produksi, misalnya : sampah-sampah pengepakan barang, logam, plastik, kayu, potongan tekstil, kaleng, dan sebagainya.

Ketujuh, sampah yang berasal dari pertanian/perkebunan. Sampah ini sebagai hasil dari perkebunan atau pertanian misalnya: jerami, sisa sayur-mayur, batang padi, batang jagung, ranting kayu yang patah, dan sebagainya.

Kedelapan, sampah yang berasal dari pertambangan. Sampah ini berasal dari daerah pertambangan, dan jenisnya tergantung dari jenis usaha pertambangan itu sendiri, misalnya: batu-batuan, tanah/cadas, pasir, sisa-sisa pembakaran (arang), dan sebagainya.

Kesembilan, sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan. Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan ini, berupa : kotoran-kotoran ternak, sisa-sisa makanan bangkai binatang, dan yang sejenis.

Ditemukan juga sampah berdasarkan jenisnya, yaitu :

Pertama, sampah berdasarkan zat kimia yang terkandung didalamnya, antara lain (1) sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang umumnya tidak dapat membusuk, misalnya: logam/besi, pecahan gelas, plastik dan sebagainya; (2) sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang pada umumnya dapat membusuk, misalnya : sisa-sisa makanan, daun- daunan, buah-buahan dan sebagainya.

Kedua, sampah berdasarkan dapat dan tidaknya terbakar. Tergolong sampah ini antara lain adalah sampah yang mudah terbakar, misalnya : kertas, karet, kayu, plastik, kain bekas dan sebagainya; sampah yang tidak dapat terbakar, misalnya: kaleng-kaleng bekas, besi/logam bekas, pecahan gelas, kaca, dan sebagainya.

Ketiga, sampah berdasarkan karakteristiknya. Sampah ini antara lain adalah (1) sbu (ashes), merupakan sisa

pembakaran dari bahan yang mudah terbakar, baik di rumah, di kantor maupun industry; (2) sampah Jalanan (street sweeping) Berasal dari pembersihan jalan dan trotoar, terdiri dari kertas-kertas, kotoran dan daun-daunan; dan (3) bangkai binatang (dead animal).

Keempat, sampah pemukiman (household refuse). Sampah ini merupakan sampah campuran yang berasal dari daerah perumahan. (1) bangkai kendaraan (abandoned vehicles), contohnya adalah bangkai mobil, truk, kereta api, satelit, kapal laut dan alat transportasi lainnya; (2) sampah industry. Terdiri dari sampah padat yang berasal dari industri

3.2. Pewadahan

Pewadahan yang dimaksud disini merupakan upaya pengumpulan sampah dari sumber sampah kemudian di kumpulkan ke dalam suatu wadah sampah atau tempat sampah baik TPS maupun TPST, hingga sampah yang dikumpulkan dapat di kumpulkan ke TPA untuk mengelola sampah sesuai prosedur. Di Kota Semarang sendiri terdapat 282 titik TPS yang tersebar di segala wilayah.

Wadah pengumpulan sampah atau kontainer sampah yang tersebar di Kota Semarang ada sekitar 455 kontainer yang beroperasi di lapangan ada sekitar 403 yang rusak 52 kontainer. Serta depo kontainer ada sekitar 200 buah yang tersimpan untuk pewadahan sampah di Kota Semarang.

3.3. Pengangkutan Sampah

Proses pengangkutan sampah yang di kelola oleh seksi operasional pengelolaan sampah bidang pengelolaan sampah dinas lingkungan hidup Kota Semarang. Adapun sarana pengangkutan sampah bertugas mengangkut sampah dari TPS maupun TPST menuju ke TPA untuk dikelola lebih lanjut. Untuk ada beberapa jenis sarana pengangkutan sampah yakni dumptruck dan armroll. DumpTruck adalah sarana pengangkut sampah yang terkumpul di bak sampah. Cara pengoprasian dumptruck tidak seperti armroll dimana tong sampah atau sampah yang diangkut tidak dapat di lepaskan. Tugas truck dumptruck ialah melakukan pengumpulan sampah terkumpul di bak sampah maupun tempat sampah yang kemudian dikumpulkan secara manual untuk dibawa ke TPA agar sampah dapat ditimbang dan langsung di buang ke TPA.

Sedangkan untuk *armroll* adalah jenis pengangkut sampah yang mengangkut

kontainer yang tersebar di 282 titik TPS. Karena dari jenis dan fungsinya truck armroll memiliki pengoprasian yang berbeda dengan dumptruck dimana truck armroll mengangkut sampah dengan mengangkat kontainer sampah yang telah terisi oleh sampah kemudian kontainer yang di angkut oleh truck armroll langsung diangkut ke TPA jatibarang untuk langsung ditimbang sebelum di masukkan ke dalam tempat pembuangan sampah dimana sampah yang masuk langsung di lakukan pemilahan sampah oleh petugas. Ketika kontainer sudah kosong maka akan kembali di tempatkan berdasarkan titik TPS.

Kota Semarang memiliki sarana pengangkut sampah berupa 173 unit truck hidrolik/armroll dimana yang beroperasi 103 unit, dan rusak/usulan penghapusan berkisaran 70 unit. Dump truck sekitar 44 unit 28 unit yang bisa beroperasi sedangkan 16 unit dikatakan rusak/usulan penghapusan.¹⁴ Dalam satu hari ada sekitar 1200 Ton sampah yang dibawa truck pengangkut sampah baik arm roll maupun dumptruck yang masuk ke TPA Jatibarang.

Adapun kendala yang di hadapi dalam proses pengangkutan sampah ialah daya tampung TPA jatibarang. Dimana tidak semua sampah dapat di angkut ke TPA jatibarang dalam jangka waktu 1 (satu) hari. Hal dikarenakan kapasitas Penampungan yang dimiliki TPA jatibarang terus mengalami penurunan di akibatkan volume sampah yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Karena itu ada sebahagian wilayah yang memiliki titik TPS saja yang dapat diangkut menuju TPST untuk menunggu hari berikutnya untuk diangkut menuju TPA jatibarang untuk dikelola, atau bahkan diangkut ke esokkan harinya. Untuk pembuangan sampah ke tpa di kenakan tarif retribusi sebesar 12.000/m³.

3.4. Pemilahan Sampah

Dalam pemilahan sampah di Kota Semarang pemerintah Kota Semarang membagi tugas kepada dinas lingkungan hidup dan TPA jatibarang. Dimana dinas lingkungan hidup mengurus dan melakukan pengadaan sarana di tingkat TPS dan TPST, dimana sampah langsung dipilah ketika dimasukkan ke tong sampah yang dipilah menurut jenis sampah. Namun dalam penyediaan sarana pemilihan sampah masih sebahagian tempat umum di Kota Semarang. Sementara pemilahan di TPS maupun di TPST sebahagian besar dilakukan oleh masyarakat sendiri yang

¹⁴ LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang hal I-20

bertujuan untuk mengelola sampah secara mandiri di tingkat kelurahannya masing-masing.

3.5. Implementasi Kenijakan Pengelolaan Sampah

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang mengacu pada Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Semarang yakni pengelolaan sampah di hulu dan di hilir. Artinya adalah bahwa pengelolaan sampah tidak selalu harus diselesaikan di tempat pembuangan akhir sampah tetapi juga dapat dilaksanakan di asal sampah itu sendiri.

Dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang pengelolaan sampah yang dijalankan oleh dinas lingkungan hidup sudah cukup baik. Namun kendala yang paling terlihat adalah cara penyediaan sampah yang di distribusikan kepada masyarakat dalam hal ini pihak kelurahan ikut andil dalam mengikut sertakan masyarakat dalam mengurangi produksi sampah bukan hanya dari segi pengolahan yang melibatkan ukm-ukm di kalangan masyarakat dimana sampah di kelola berdasarkan jenis dan kegunaannya hal inilah yang menginspirasi terbentuknya tpst atau TPS3R (Reuse, reduce, dan Recycle) dimana masyarakat dianggap dapat mengolah sampah langsung dari sumbernya. Penyediaan sarana juga harus di barengi dengan kemampuan p[etugas dalam hal mengontrol dan mengayomi kebutuhan masyarakat untuk bersama-sama menimbang pentingnya pengendalian sampah dari dasar.

Pemerintah dalam hal pelaksanaan pengelolaan sampah di wakili oleh dinas lingkungan hidup bergerak di bidang kebersihan dimana truck dan kontainer di sebarkan di seluruh kelurahan di Kota Semarang namun tingkat kesadaran masyarakat lah yang menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk mengendalikan sampah itu sendiri.

Dalam hal pengembangan dan pemeliharaan sarana baik sarana tps, tpst dan tpa pemerintah semarang termasuk mengikutsertakan atau menginovasi dalam mengelola sampah di TPS dimana

pemerintah dalam hal ini dinas lingkungan hidup Kota Semarang menerbitkan aplikasi berupa Lapor Sampah Online dimana aplikasi ini berguna untuk melaporkan permasalahan pengelolaan sampah seperti tps yang mengalami over capacity serta penumpukan sampah yang sudah lama tidak di angkut dari tps ke tpa. Aplikasi lapor sampah juga merupakan terobosan baru dalam mengikut sertakan masyarakat akan pentingnya kepekaan akan sampah itu sendiri.

Untuk saat ini kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah sudah dianggap cukup mumpuni baik dalam segi mengawasi distribusi sampah mulai dari sumber sampah hingga ke TPA maupun di aspek pelayanan terhadap masyarakat di segala aspek. namun pengelolaan sampah sendiri masih di anggap kurang efisien dikarenakan kurangnya kapasitas baik dari fasilitas sarana pengangkutan, pengolahan, dan pemilahan sampah maupun TPA Jatibarang sendiri yang terus mengalami peningkatan volume sampah dari tahun ke tahun.

Secara umum, implemetasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di Kota Semarang belum semua proses pengelolaannya berjalan baik sesuai dengan apa yang di diharapkan. Beberapa tahapan, misalnya kegiatan pembatasan timbunan sampah masih mengalami kendala. Hal ini sebagian besar dikarenakan masih banyaknya warga masyarakat yang kurang sadar akan masalah sampah ini sehingga dengan sembarang menimbun sampah di TPS-TPST atau tempat penampungan sampah yang ada.

Demikian juga dengan tahapan pendauran ulang sampah. Pendauran ulangan sampah ini diharapkan mampu mengurangi jumlah masukan sampah ke TPA Jatibarang dengan cara pendauran ulang di sumber sampah yakni di lingkungan warga masyarakat.

Tahapan berikutnya yang dinilai belum terlaksana dengan maksimal yakni pada tahapan pemanfaatan kembali. Kegiatan pemanfaatan kembali sampah terkendala sebagian besar dikarenakan kurangnya sumber daya, baik tenaga ahli maupun keterampilan warga masyarakat untuk mengolah kembali atau memanfaatkan kembali sampah menjadi barang-barang daur ulang yang mempunyai nilai.

Selanjutnya tahapan pengangkutan sampah. Dengan adanya pembagian wilayah kerja dan juga pembagian tugas

oleh beberapa lembaga pelaksana, baik pemerintah dan juga swasta tentunya memudahkan proses pengangkutan ini.

Masalahnya masih sering dijumpai sampah TPS yang overload (pada beberapa kasus) yang membutuhkan petugas yang lebih banyak lagi. Sumber daya manusia berupa petugas pengangkutan sampah milik pemerintah (petugas harian lapangan) dinilai masih kurang apabila dibandingkan dengan luasnya wilayah yang harus dijangkau oleh petugas pengangkut. Disamping kurangnya petugas, hal lain yang menjadi kendala utama dalam proses pengangkutan adalah sarana prasarana truk pengangkut yang juga kurang memadai, baik dari segi jumlah juga dari segi kualitas.

Kendati demikian, beberapa tahapan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang juga ada yang sudah terlaksana dengan baik diantaranya yaitu kegiatan pengumpulan dan juga kegiatan pemrosesan akhir. Kedua proses ini sudah dilaksanakan dengan baik, baik oleh warga masyarakat pada tingkat kelurahan dalam hal proses pengumpulan, karena proses pengumpulan sampah berada pada tingkatan warga masyarakat, dan juga proses pemrosesan akhir yang dilaksanakan oleh petugas dari pemerintah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagai petugas yang mengurus pengangkutan sampah di TPA Jatibarang dalam bentuk menumpukan dan juga penanganan limbah sampah sebelum dibuang kembali ke alam secara aman. Petugas lain yang mengurus pemrosesan akhir adalah dari PT.Jatibarang yang mengolah sampah (organik) menjadi produk pupuk.

Secara umum ditemukan beberapa kendala dalam pengelolaan sampah yaitu : (1) Cepatnya perkembangan teknologi, lebih cepat daripada kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memahami persoalan persampahan; (2) Meningkatnya tingkat hidup masyarakat, yang tidak disertai dengan keselarasan pengetahuan tentang persampahan; (3) Kebiasaan pengelolaan sampah yang tidak efisien menimbulkan pencemaran udara, tanah dan air, gangguan estetika dan memperbanyak populasi lalat dan tikus; (4) Semakin sulitnya mendapatkan lahan sebagai tempat pembuangan akhir sampah, selain tanah serta formasi tanah yang tidak cocok bagi pembuangan sampah, juga terjadi kompetisi yang semakin rumit akan penggunaan tanah; (5) Semakin banyaknya masyarakat yang berkeberatan bahwa daerahnya

dipakai tempat pembuangan sampah; (6) Kurangnya pengawasan dan pelaksanaan peraturan; (7) Sulitnya menyimpan sampah sementara yang cepat busuk, karena cuaca yang panas; (8) Sulitnya mencari partisipasi masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan memelihara kebersihan; (9) Pembiayaan yang tidak memadai, mengingat bahwa sampai saat ini kebanyakan sampah dikelola oleh jawatan pemerintah dan (10) Pengelolaan sampah dimasa lalu dan saat ini kurang memperhatikan faktor non teknis seperti partisipasi masyarakat dan penyuluhan tentang hidup sehat dan bersih.

3.6. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

Teori *George C. Edwards III* (1980) Dalam pandangan *Edwards III*, studi implementasi kebijakan adalah *salah satu tahap kebijakan publik antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel*, yakni:¹⁵

Komunikasi, Secara umum Edwards membahas 3 hal penting dalam proses Komunikasi kebijakan, yakni: Transmisi, Kejelasan, dan Konsistensi Sumber-sumber, Sumber-sumber yang penting meliputi, Staf yang memadai, Informasi, Wewenang dan Fasilitas yang mendukung.

Kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Dampak dari kecenderungan-kecenderungan dikarenakan banyaknya kebijakan yang masuk ke dalam “zona ketidakacuhan”. Menurut Edwards Kebijakan-kebijakan yang masuk kedalam “zona ketidakacuhan” ini mungkin bertentangan dengan pandangan-pandangan kebijakan substantif para pelaksana atau kepentingan pribadi atau organisasi mereka. Di sinilah kecenderungan-

¹⁵ [https://eprints.uny.ac.id/22818/4/BAB II.pdf](https://eprints.uny.ac.id/22818/4/BAB%20II.pdf), di unduh pada 30 maret 2018

kecenderungan menimbulkan hambatan-hambatan terhadap implementasi.

Struktur Birokrasi, merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksanaan kebijakan. Dimana birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.

Ripley dan **Franklin**, berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap birokrasi di amerika serikat, mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi, Birokrasi di manapun berada, dipilih sebagai instrumen sosial yang ditujukan untuk menangani masalah-masalah yang didefinisikan sebagai urusan politik. Birokrasi merupakan instuisi yang dominan dalam pelaksanaan program, Dimana keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. (**Subarsono**, 2005:90)¹⁶ **Ripley** dan **Franklin** (1982) menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan program dan ditinjau dari tiga faktor yaitu:

Prespektif kepatuhan (compliance) yang mengukur implementasi dari kepatuhan atas mereka, keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan dan implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan. (Tangkilisan, 2003:21)¹⁷

3.1.1 Komunikasi

Dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sampah

Dinas Lingkungan Hidup merujuk Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 menjadi acuan dasar dalam kegiatan pengelolaan sampah baik pengurangan maupun penanganan. Lemahnya proses transisi terkait perintah atau instruksi-instruksi, baik dari petugas Dinas kepada sesama petugas maupun oleh petugas kepada masyarakat dinilai menjadi penyebabnya.

Dari keseluruhan proses tersebut, komunikasi peraturan terkait kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang dinilai masih kurang baik, walaupun memang sudah dilaksanakan pada beberapa kesempatan baik berupa sosialisasi dan juga pemberitahuan atau iklan lewat siaran radio. Namun, itu dinilai masih kurang apabila diperhatikan dari tingkat pengetahuan dan kepedulian masyarakat terkait kebijakan pengelolaan sampah apalagi jika pemberitahuan di radionya hanya kadang-kadang saja.

3.1.2 Sumber Daya

Sehubungan dengan sumber daya manusia, untuk pengimplementasian kebijakan serta pengelolaan sampah di Kota Semarang dinilai masih terkendala. Ada beberapa hal yang menjadi penghambat dalam SDM ini yakni antara lain jumlah petugas yang masih kurang dan juga tingkat pengetahuan serta penguasaan SDM itu sendiri. Dalam kaitannya penyelenggaraan sampah di Kota Semarang yang mana tugas dari Dinas Lingkungan Hidup adalah kegiatan pengangkutan dan pengolahan sampah.

Untuk pengangkutan sampah sehari-harinya menjadi tanggungjawab dari pengangkutan sampah dan untuk seksi operasional pengelolaan sampah mempunyai tanggungjawab dalam kegiatan pengolahan sampah di Kota Semarang. Jumlah personil di Dinas Lingkungan Hidup khususnya di bagian angkutan sampah masih perlu adanya tambahan, tentu saja hal ini didasarkan pada besarnya beban kerja yang diterima oleh seksi angkutan sampah.

3.1.3 Disposisi

Disamping SDM, hal lain yang tidak kalah penting yakni sarana dan prasarana. Jumlah dan kualitas sarana prasarana pengelolaan sampah di Kota Semarang dinilai masih dari apa yang dibutuhkan dilapangan. Dalam hal pengangkutan misalnya, dibutuhkan jumlah truk pengangkut sampah yang lebih banyak lagi

¹⁶ <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-implementasi-kebijakan.html>. diunduh pada tanggal 6 juli 2017, 18.04 WIB

A. G Subarsono, 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

¹⁷ <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-implementasi-kebijakan.html>. diunduh pada tanggal 2 juli 2017, 15.02 WIB

Tangkilisan, Hesel. Nogi. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI

dan juga kualitas yang baik. Jumlah turk serta petugasnya masih kurang apabila dibandingkan dengan luasnya cakupan wilayah Kota Semarang yang harus ditangani. Selama ini respon dari aparat pelaksana cukup baik dan cukup mendukung, karena ini juga merupakan kebijakan dari pemerintah Kota sehingga setiap aparat pelaksana mendukung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sampah. Adanya respon yang baik dari aparat pelaksana harus disertai pula oleh pemahaman aparat pelaksana terhadap kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sampah.

3.1.4 Struktur Birokrasi

Pada struktur birokrasi yang ada di Kota Semarang sudah termasuk jelas dan juga dinilai sudah kondisi baik. Koordinasi dengan sesama lembaga di kawasan pemerintahan Kota Semarang dinilai sudah berjalan dengan baik termasuk juga dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengelolaan Pasar dan juga dari SATPOL PP sebagai penindak dan penengak berlangsungnya peraturan terkait penindakan kepada pelanggar kebijakan.

Faktor yang dinilai menjadi faktor pendorong pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 adalah disposisi, secara umum respon yang ditunjukkan oleh aparat pelaksana sudah cukup baik sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Faktor lain yang menjadi pendorong adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang tidak rumit dan berbelit-belit menjadikan proses pelaksanaan kebijakan menjadi lebih mudah.

Ada beberapa faktor penghambat dalam penyelenggaraan kebijakan. Faktor komunikasi secara keseluruhan belum berjalan sebagaimana diharapkan. Saluran komunikasi atau transmisi dinilai belum baik, penyampaian kebijakan juga belum jelas serta pelaksanaannya yang dinilai belum konsisten. Ketiga hal tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap seberapa tahu warga masyarakat tentang peraturan daerah itu sendiri. Tujuan pengkomunikasian itu sebenarnya adalah agar masyarakat secara luas dapat mengetahui apa perda pengelolaan sampah serta bagaimana cara pelaksanaannya dilapangan. Namun, dikarenakan faktor komunikasi yang lemah dari petugas menyebabkan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah kurang berjalan

dengan baik pada tingkat warga masyarakat.

Faktor berikutnya yang juga sangat mempengaruhi atau menghambat pengimplementasian kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang yakni sumber daya. Sumber daya yang dimaksud disini adalah sumber daya manusi juga sumber daya.

4. SIMPULAN

Implementasi pasal 17 peraturan daerah kota Semarang nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah cukup baik, hal ini dapat dilihat pemeliharaan TPS, TPST dan TPA beserta pengembangannya sesuai dengan kebutuhan.

Ketersediaan sarana di TPS, TPST, dan TPA belum optimal. Dalam melakukan pemeliharaan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) Dinas Lingkungan hidup menyebarkan lebih dari 455 kontainer di 282 titik TPS. Dinas Lingkungan Hidup hanya bertugas dalam pemeliharaan sarana di titik TPS namun perihal mengenai penyediaan sarana tong sampah alat pengangkut sampah di tingkat TPS adalah tanggung jawab dari pihak kelurahan setempat, namun dalam hal ini DLH membuka tangan untuk menerima pengajuan pengadaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah kepada pihak kelurahan di Kota Semarang sebagai bentuk apresiasi akan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

Pemeliharaan TPST atau TPS3R merupakan salah satu program dari dinas lingkungan hidup untuk mengurangi produksi sampah yang di angkut ke TPA, upaya DLH adalah melakukan pelatihan-pelatihan terhadap KSM-KSM untuk meningkatkan kreatifitas dalam pengelolaan sampah. Sayangnya hanya sebahagian kecil wilayah/kepurahan yang mampu mengelola sampahnya sendiri untuk menjadi barang-barang yang bersifat finansial.

Dalam hal pemeliharaan TPST/TPS3R masyarakat diberikan ruang untuk mengelola secara pribadi. DLH siap untuk meningkatkan atau memelihara TPST/TPS3R tidak lain untuk pengurangan produksi sampah itu sendiri.

Inovasi-inovasi terus dikembangkan oleh TPA Jatibarang dimana fokus utamanya untuk mengurangi atau bahkan mengelola sampah sebagai energi yang terbarukan. TPA Jatibarang telah melakukan pengembangan dalam pengolahan sampah dimana timbunan

sampah yang masuk ke TPA sudah bisa diolah menjadi Biogas dan aliran Listrik.

Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang adalah komunikasi dan disposisi. Untuk SDM masih diperlukan baik kuantitas maupun kualitas, sedangkan struktur birokrasi perlu untuk ditingkatkan dalam efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah.

Untuk meningkatkan kualitas implementasi diperlukan beberapa hal yaitu : (a) Melakukan sosialisasi secara rutin kepada pihak-pihak yang terkait baik masyarakat di sekitaran TPS maupun masyarakat yang pada pelaksanaan kebijakan baik kelurahan, warga masyarakat di tingkat RT dan RW, serta para pelaku usaha yang memproduksi suatu barang untuk membahas tentang peran dan fungsi masing-masing elemen dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. ; (2) Mengencarkan penambahan SDM baik dari segi kualitas maupun kapasitas; (3) Melakukan penambahan jumlah staf pada Badan Dinas maupun petugas di lapangan. Penambahan jumlah staf ini juga harus memperhatikan kualitas dan kompetensi dari staf/petugas serta juga harus melakukan peningkatan kualitas staf lama yang dapat dilakukan dengan bimbingan teknis, pelatihan khusus dan sebagainya terkait pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Semarang; (4) Melakukan penambahan jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan sampah, termasuk penambahan jumlah armada truk pengangkut sampah, kontainer sampah di TPS-TPST serta alat-alat pendukungnya. Ini dimaksudkan agar pelaksanaan pengelolaan di lapangan tidak tersendak yang sering sekali dikarenakan sarana prasarana yang tidak mencukupi atau rusak. Usaha pemeliharaan serta peremajaan juga sangat dibutuhkan bagi TPS-TPS yang sudah lama, juga termasuk pemeliharaan serta peremajaan TPA Jatibarang dan (5) Mendukung dan menjalin kerja sama dengan KSM.

5. DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. (2008). *dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung : alfabeta.
Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.

Albert E. S. Abrauw, *Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Anorganik Di Kecamatan Abepura Kota Jayapura*, ISSN 0125-1790 MGI Vol. 25,

Dunn, N. William (2003). *Pengantar analisis kebijakan public Edisi kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

E. Damanhuridan Tri Padmi, *Probleme de Dechets Urban en Indonesie*, TFE ENTPE (Perancis), (1982) E. Damanhuri (Editor): *Teknik Pengelolaan Persampahan –*

G. Theisen Tchobanoglous, dan S.A. Vigil, *Integrated Solid Waste Mangement Engineering Principles and Mangement Issues*. (Singapore, Mc. Grw Hill, 1993)

Keban. Yeremias, (2008), *Enam dimensi Strategis administrasi publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

Islamy, M. Irfan. (2009). *prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan Negara*. Jakarta : bumi aksara.

Islamy, Irfan. (1994). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nugroho, Riant. (2004). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo Gramedia.

Tangkilisan, Hesel. Nogi. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.

Suwitri, Sri. (2009). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. No. 1, Maret 2011 (1 -14) © 2009 Fakultas Geografi UGM dan Ikatan Geograf Indonesia.

Suharno. (2010). *Dasar-Dasar kebijakan publik*. Yogyakarta: UNY Press.

Aini, Sarifah. (2010). *Studi kualitas pelayanan pembuatan kartu keluarga (KK) di kantor kecamatan tembalang kota semarang*. fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas diponegoro, semarang. (skripsi sarjana administrasi publik).

Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta : Buku kita
Damanhuri, Eri. (2007). *Sampah Indonesia*. Bandung: Teknik Lingkungan ITB.

Winarno,Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media pressindo.

<https://geotimes.co.id/2019-produksi-sampah-di-indonesia-671-juta-ton-sampah-per-tahun>

<https://semarangkota.bps.go.id/website/pdf/publikasi/Kota%20Semarang%20dlm%20Angka%202016-wm.pdf> di unduh pukul 15.19 WIB tanggal 6 juli 2017 hal :75

<http://metrosemarang.com/benahi-pengelolaan-sampah-pemkot-anggarkan-90-kontainer-baru>

<http://beritajateng.net/edan-sampah-yang-dihasilkan-kota-semarang-capai-1-200-ton-perhari/>

<http://berita.suaramerdeka.com/sampah-masalah-serius-kota-semarang/>

<http://semarangkota.go.id/berita/read/7/berita-kota/1574/semarang-hasilkan-1000-ton-sampah-perhari-sekda-minta-warga-peduli>

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-implementasi-kebijakan.html>. diunduh pada tanggal 6 juli 2017, 18.04 WIB

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-implementasi-kebijakan.html>. diunduh pada tanggal 2 juli 2017, 15.02 WIB

<http://lembahperasaan.blogspot.co.id/2010/03/model-model-dalam-kebijakan-publik.html>.diunduh pada tanggal 16juli 2017, 02.30 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Administrasi_publik di unduh pada 25 maret 2018

https://eprints.uny.ac.id/22818/4/BAB_II.pdf , di unduh pada 30 maret 2018

https://www.academia.edu/23591052/Teori_Adm_Publik di unduh pada 26 maret 2018

Modul A dan Modul B, Disiapkan untuk PT. Freeport Indoensia, (Bandung: Teknik Lingkungan ITB, 1999).

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Kota Semarang.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang *Pengelolaan Sampah*.

Laporan Kinerja Instansi (LKJ-IP) Pemerintah Kota Semarang 2015. Data dan Informasi Lingkungan Hidup Jawa Tengah tahun 2014, BLH Jawa Tengah

Siaran Pers Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/03/15/omv2sg319-setiap-hari-indonesia-produksi-sampah-65-juta-ton>